

SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15

- Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 8);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
10. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
11. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
12. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
13. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
14. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
15. Padat Karya Tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan

mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

16. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan Jumlah Desa secara nasional.
17. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
18. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa
19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
20. Indek Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut dengan IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
21. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.
22. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
25. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

26. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
30. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
31. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
32. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, dan berbadan hukum.
33. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disebut BUM Desma adalah badan usaha yang dibentuk dalam rangka kerja sama antar-Desa dan pelayanan usaha antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.
34. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

35. Penyaluran adalah transfer dana dari Kas Daerah ke Kas Desa.
36. Capaian *Output* adalah realisasi kegiatan penggunaan Dana Desa sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan.
37. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
38. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah, yang ditentukan oleh Bupati, untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
39. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.
40. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar-Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi Jumlah Desa.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

| | |
|--------------|--|
| AF Desa | = Alokasi Formula setiap Desa |
| Z1 | = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa |
| Z2 | = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa |
| Z3 | = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa |
| Z4 | = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa |
| AF Kabupaten | = Alokasi Formula Kabupaten |

Pasal 10

IKG setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima peraturan Desa mengenai APB Desa dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.

- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II secara bersamaan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu keempat bulan Juni masing-masing sebesar 20% (dua puluh persen) dan 40% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (8) Pemerintah Daerah memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pemerintah Daerah yang:
- a. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD kurang dari 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD; dan
 - b. melaksanakan penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk tahap III paling lambat bulan November;
- berdasarkan data transaksi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari RKUD ke RKD.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I dan tahap II berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa; dan
 - b. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (10) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-

rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (11) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (12) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (13) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:
 - a. peningkatan kualitas hidup;
 - b. peningkatan kesejahteraan;
 - c. penanggulangan kemiskinan; dan
 - d. peningkatan pelayanan publik.

Pasal 14

- (1) Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Dana Desa dapat juga digunakan untuk bidang prioritas Daerah setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APB Desa dan/atau Perubahan APB Desa.

Pasal 15

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan kegiatannya diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja (padat karya) dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b diutamakan untuk :
 - a. membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - b. menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - c. meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin; dan
 - d. meningkatkan pendapatan asli Desa.
- (3) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c diutamakan untuk :
 - a. membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - b. melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - c. melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - d. menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin; dan

- e. melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*).
- (4) Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Pasal 17

Desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi :
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan :
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi;
 4. informasi dan komunikasi; dan
 5. sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas :
 1. kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi :
 1. usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 2. usaha industri kecil dan/atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen; dan
 3. usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan

perdesaan.

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan dalam untuk:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 1. konflik sosial; dan;
 2. bencana sosial.
- (2) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 19

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 - b. pembangunan dan pengembangan embung dan/atau penampungan air kecil lainnya;
 - c. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga Desa; dan
 - d. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa dan/atau BUM Desma.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a huruf b, dan huruf c dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desma.
- (3) Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

Pasal 20

- (1) Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan Padat Karya Tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan secara swakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi

- tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di Desa.
- (2) Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. memanfaatkan Dana Desa untuk bidang pembangunan Desa;
 - b. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan; dan
 - c. menciptakan lapangan kerja
 - (3) Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikerjakan pada saat musim panen.
 - (4) Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Pasal 21

- (1) Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), yaitu:
 - a. perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
 - b. peningkatan pola hidup bersih dan sehat; dan
 - c. pencegahan kematian ibu dan anak.
- (2) Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), paling sedikit meliputi:
 - a. penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
 - b. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi; dan
 - c. pengembangan kebudayaan Desa sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak dan warga masyarakat berkebutuhan khusus.

BAB V
MEKANISME PENETAPAN PRIORITAS
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 22

- (1) Mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul; dan
 - b. Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Pasal 23

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan bagi penyusunan RKPD dan APB Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dalam penyusunan RKPD.
- (5) Pemerintah Daerah menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) RKPD dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 24

Desa dalam merencanakan Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, mempertimbangkan Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa.

Pasal 25

- (1) Tipologi Desa dan tingkat perkembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 didasarkan pada data IDM.
- (2) Data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan Pemerintah Desa untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 26

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya ;
 - b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Pebruari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VII
PENUNDAAN PENYALURAN
Pasal 27

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8);
 - b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dikecualikan dari penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi

atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

Pasal 28

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda sebagaimana Pasal 27 dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari

RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Pebruari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari Rekening Kas Umum Negara ke RKUD tahun anggaran berjalan.

- (7) Bagi Pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi Sisa Anggaran Lebih pada Rekening Kas Umum Negara.

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sampai dengan akhir minggu kedua bulan juni.

- (2) Bagi pemerintah Daerah yang memiliki predikat kinerja baik dalam penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada saat penyaluran Dana Desa tahap III.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

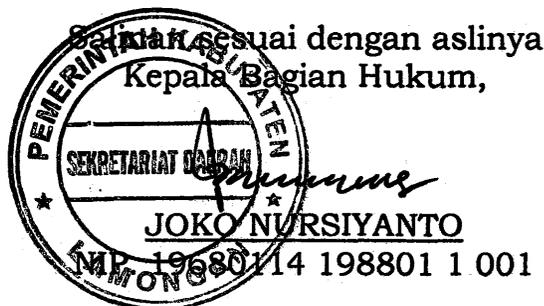
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 28 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 77



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR 77 TAHUN 2019
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN LAMONGAN
 TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
 DI KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2020

| NO. | KECAMATAN/DESA | JUMLAH DANA DESA (Rp) |
|-----|-------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | SUKORAME | |
| 1. | 1. SEMBUNG | 767.637.000 |
| 2. | 2. BANGGLE | 781.542.000 |
| 3. | 3. KEDUNGKUMPUL | 1.125.136.000 |
| 4. | 4. SUKORAME | 1.076.142.000 |
| 5. | 5. MRAGEL | 784.062.000 |
| 6. | 6. KEDUNGREJO | 761.292.000 |
| 7. | 7. SEWOR | 834.748.000 |
| 8. | 8. WEDORO | 768.389.000 |
| 9. | 9. PENDOWOKUMPUL | 768.847.000 |
| | JUMLAH | 7.667.795.000 |
| 2. | BLULUK | |
| 1. | 1. TALUNREJO | 1.150.430.000 |
| 2. | 2. BANJARGONDANG | 762.176.000 |
| 3. | 3. BLULUK | 751.347.000 |
| 4. | 4. CANGKRING | 786.308.000 |
| 5. | 5. BRONJONG | 764.428.000 |
| 6. | 6. SONGOWARENG | 807.444.000 |
| 7. | 7. KUWUREJO | 800.248.000 |
| 8. | 8. SUMBERBANJAR | 820.369.000 |
| 9. | 9. PRIMPEN | 881.735.000 |
| | JUMLAH | 7.524.485.000 |
| 3. | MODO | |
| 1. | 1. JEGREG | 1.191.526.000 |
| 2. | 2. KEDUNGPENGARON | 850.290.000 |
| 3. | 3. SUMBERAGUNG | 757.089.000 |
| 4. | 4. KEDUNGLEREP | 779.023.000 |
| 5. | 5. JATIPAYAK | 823.742.000 |
| 6. | 6. KEDUNGWARAS | 789.456.000 |
| 7. | 7. SIDOMULYO | 926.744.000 |
| 8. | 8. SAMBANGREJO | 762.868.000 |
| 9. | 9. MEDALEM | 752.681.000 |
| 10. | 10. SIDODOWO | 846.762.000 |
| 11. | 11. MOJOREJO | 811.443.000 |
| 12. | 12. SAMBUNGREJO | 799.798.000 |
| 13. | 13. KEDUNGREJO | 758.379.000 |
| 14. | 14. KACANGAN | 756.657.000 |
| 15. | 15. NGUWOK | 721.120.000 |
| 16. | 16. PULE | 819.460.000 |
| 17. | 17. YUNGYANG | 774.264.000 |
| | JUMLAH | 13.921.302.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|-----------------|----------------|
| 4. | NGIMBANG | |
| 1. | KEDUNGMENTAWAR | 732.935.000 |
| 2. | CERME | 760.656.000 |
| 3. | GEBANGANGKRIK | 858.000.000 |
| 4. | NGASEMLEMAHBANG | 752.317.000 |
| 5. | SLAHARWOTAN | 912.012.000 |
| 6. | GANGGANGTINGAN | 785.884.000 |
| 7. | JEJEL | 762.983.000 |
| 8. | PURWOKERTO | 799.755.000 |
| 9. | KAKATPENJALIN | 828.372.000 |
| 10. | TLEMANG | 776.519.000 |
| 11. | MENDOGO | 814.892.000 |
| 12. | LAWAK | 848.887.000 |
| 13. | DRUJUGURIT | 739.416.000 |
| 14. | GIRIK | 854.478.000 |
| 15. | MUNUNGREJO | 821.517.000 |
| 16. | NGIMBANG | 750.114.000 |
| 17. | DURIKEDUNGJERO | 770.006.000 |
| 18. | LAMONGREJO | 848.358.000 |
| 19. | SENDANGREJO | 1.018.520.000 |
| | JUMLAH | 15.435.621.000 |
| 5. | BABAT | |
| 1. | KARANGKEMBANG | 790.579.000 |
| 2. | PUCAKWANGI | 725.258.000 |
| 3. | SOGO | 734.124.000 |
| 4. | BEDAHAN | 744.721.000 |
| 5. | TRUNI | 783.685.000 |
| 6. | GENDONGKULON | 829.435.000 |
| 7. | PLAOSAN | 992.579.000 |
| 8. | TREPAN | 756.508.000 |
| 9. | KURIPAN | 941.012.000 |
| 10. | KEBALANPELANG | 779.834.000 |
| 11. | SUMURGENUK | 1.274.183.000 |
| 12. | GEMBONG | 829.768.000 |
| 13. | BULUMARGI | 1.051.388.000 |
| 14. | DATINAWONG | 1.020.457.000 |
| 15. | KEBALANDONO | 867.368.000 |
| 16. | PATIHAN | 841.217.000 |
| 17. | MOROPELANG | 1.050.043.000 |
| 18. | KEYONGAN | 879.892.000 |
| 19. | SAMBANGAN | 790.621.000 |
| 20. | TRITUNGGAL | 841.721.000 |
| 21. | KEBONAGUNG | 748.218.000 |
| | JUMLAH | 18.272.611.000 |
| 6. | KEDUNGPRING | |
| 1. | DRADAHBLUMBANG | 933.914.000 |
| 2. | KALEN | 753.215.000 |
| 3. | MOJODADI | 747.129.000 |
| 4. | GUNUNGREJO | 777.018.000 |
| 5. | WARUNGERING | 1.496.181.000 |
| 6. | JATIDROJOG | 738.305.000 |
| 7. | KRADENANREJO | 818.678.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|----|----------|-----------------|----------------|
| | 8. | KANDANGREJO | 720.187.000 |
| | 9. | KEDUNGPRING | 754.370.000 |
| | 10. | TLANAK | 751.579.000 |
| | 11. | SUKOMALO | 767.156.000 |
| | 12. | MLATI | 753.488.000 |
| | 13. | KARANGCANGKRING | 728.566.000 |
| | 14. | MEKANDEREJO | 914.874.000 |
| | 15. | BANJAREJO | 741.497.000 |
| | 16. | SIDOBANGUN | 949.286.000 |
| | 17. | BLAWIREJO | 747.146.000 |
| | 18. | MAINDU | 742.714.000 |
| | 19. | TENGGEREJO | 807.288.000 |
| | 20. | MAJENANG | 822.476.000 |
| | 21. | SIDOMLANGEAN | 747.475.000 |
| | 22. | NGLEBUR | 754.524.000 |
| | 23. | SUMENGKO | 753.065.000 |
| | JUMLAH | | 18.720.131.000 |
| 7. | BRONDONG | | |
| | 1. | LOHGUNG | 982.860.000 |
| | 2. | LABUHAN | 839.539.000 |
| | 3. | SIDOMUKTI | 973.731.000 |
| | 4. | BRENGKOK | 894.006.000 |
| | 5. | TLOGORETNO | 752.716.000 |
| | 6. | SENDANGHARJO | 917.913.000 |
| | 7. | LEMBOR | 871.726.000 |
| | 8. | SEDAYULAWAS | 1.236.321.000 |
| | 9. | SUMBERAGUNG | 845.730.000 |
| | JUMLAH | | 8.314.542.000 |
| 8. | LAREN | | |
| | 1. | DATENG | 791.684.000 |
| | 2. | JABUNG | 767.363.000 |
| | 3. | KEDUYUNG | 768.306.000 |
| | 4. | CENTINI | 775.078.000 |
| | 5. | DURIKULON | 808.528.000 |
| | 6. | PESANGGRAHAN | 748.254.000 |
| | 7. | GELAP | 826.674.000 |
| | 8. | MOJOASEM | 778.257.000 |
| | 9. | SISER | 770.827.000 |
| | 10. | BULUTIGO | 807.427.000 |
| | 11. | PELANGWOT | 851.562.000 |
| | 12. | LAREN | 888.608.000 |
| | 13. | GAMPANGSEJATI | 770.585.000 |
| | 14. | TAMANPRIJEG | 835.313.000 |
| | 15. | KARANGTAWAR | 738.025.000 |
| | 16. | TEJOASRI | 850.922.000 |
| | 17. | GODOG | 837.891.000 |
| | 18. | BULUBRANGSI | 765.089.000 |
| | 19. | KARANGWUNGULOR | 865.311.000 |
| | 20. | BRANGSI | 743.023.000 |
| | JUMLAH | | 15.988.727.000 |
| 9. | SEKARAN | | |
| | 1. | BESUR | 779.504.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|---------|---------------|----------------|
| | 2. | TITIK | 722.995.000 |
| | 3. | KENDAL | 791.039.000 |
| | 4. | KETING | 747.480.000 |
| | 5. | NGARUM | 749.247.000 |
| | 6. | KEBALANKULON | 739.381.000 |
| | 7. | KUDIKAN | 807.453.000 |
| | 8. | JUGO | 767.722.000 |
| | 9. | MANYAR | 808.337.000 |
| | 10. | TROSONO | 894.137.000 |
| | 11. | LATEK | 782.497.000 |
| | 12. | MIRU | 809.673.000 |
| | 13. | SEKARAN | 952.592.000 |
| | 14. | MORO | 709.289.000 |
| | 15. | KARANG | 721.532.000 |
| | 16. | KEMBANGAN | 725.320.000 |
| | 17. | SIMAN | 727.377.000 |
| | 18. | BULUTENGGER | 902.701.000 |
| | 19. | PORODESO | 720.968.000 |
| | 20. | BUGEL | 732.497.000 |
| | 21. | SUNGEGENENG | 788.507.000 |
| | JUMLAH | | 16.380.248.000 |
| 10. | MADURAN | | |
| | 1. | DURIWETAN | 743.353.000 |
| | 2. | TAJI | 791.597.000 |
| | 3. | BRUMBUN | 746.793.000 |
| | 4. | SIWURAN | 727.053.000 |
| | 5. | KLAGENSRAMPAT | 785.679.000 |
| | 6. | PANGEAN | 772.512.000 |
| | 7. | MADURAN | 718.450.000 |
| | 8. | JANGKUNGSOMO | 728.332.000 |
| | 9. | PARENGAN | 720.534.000 |
| | 10. | PANGKATREJO | 747.237.000 |
| | 11. | KANUGRAHAN | 924.615.000 |
| | 12. | GUMANTUK | 839.243.000 |
| | 13. | NGAYUNG | 765.335.000 |
| | 14. | PRINGGOBOYO | 740.458.000 |
| | 15. | GEDANGAN | 780.132.000 |
| | 16. | TURI | 798.061.000 |
| | 17. | BLUMBANG | 728.856.000 |
| | JUMLAH | | 13.058.240.000 |
| 11. | SAMBENG | | |
| | 1. | SIDOKUMPUL | 793.025.000 |
| | 2. | PASARLEGI | 912.681.000 |
| | 3. | SEMAMPIREJO | 772.378.000 |
| | 4. | WATESWINANGUN | 805.046.000 |
| | 5. | SUMBERSARI | 758.911.000 |
| | 6. | PATAAN | 852.491.000 |
| | 7. | TENGGIRING | 786.224.000 |
| | 8. | GARUNG | 755.461.000 |
| | 9. | WONOREJO | 921.168.000 |
| | 10. | ARDIREJO | 830.090.000 |
| | 11. | SEKIDANG | 749.165.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|--------|------------------|----------------|
| | 12. | KEDUNGWANGI | 766.552.000 |
| | 13. | JATIPANDAK | 827.040.000 |
| | 14. | CANDISARI | 791.437.000 |
| | 15. | NOGOJATISARI | 756.626.000 |
| | 16. | PAMOTAN | 849.137.000 |
| | 17. | WUDI | 757.550.000 |
| | 18. | BARUREJO | 743.856.000 |
| | 19. | KEDUNGBANJAR | 715.668.000 |
| | 20. | GEMPOLMANIS | 756.653.000 |
| | 21. | SELOREJO | 927.466.000 |
| | 22. | KRETERANGGON | 881.351.000 |
| | JUMLAH | | 17.709.976.000 |
| 12. | SUGIO | | |
| | 1. | SIDOBOGEM | 736.282.000 |
| | 2. | KALITENGAH | 855.999.000 |
| | 3. | KEDUNGDADI | 818.171.000 |
| | 4. | SIDOREJO | 901.401.000 |
| | 5. | KEDUNGBANJAR | 753.717.000 |
| | 6. | BEDINGIN | 894.242.000 |
| | 7. | BAKALREJO | 752.364.000 |
| | 8. | GONDANGLOR | 885.054.000 |
| | 9. | PANGKATREJO | 756.823.000 |
| | 10. | KARANGSAMBIGALIH | 799.873.000 |
| | 11. | SUPENUH | 861.542.000 |
| | 12. | LEBAKADI | 805.573.000 |
| | 13. | DEKETAGUNG | 796.778.000 |
| | 14. | JUBELLOR | 809.426.000 |
| | 15. | SUGIO | 944.863.000 |
| | 16. | DALIWANGUN | 759.442.000 |
| | 17. | JUBELKIDUL | 825.383.000 |
| | 18. | LAWANGANAGUNG | 1.075.768.000 |
| | 19. | KALIPANG | 734.676.000 |
| | 20. | GERMAN | 774.929.000 |
| | 21. | SEKARBAGUS | 862.141.000 |
| | JUMLAH | | 17.404.447.000 |
| 13. | PUCUK | | |
| | 1. | PUCUK | 720.342.000 |
| | 2. | GEMPOLPADING | 744.723.000 |
| | 3. | KESAMBI | 730.914.000 |
| | 4. | PLOSOSETRO | 743.273.000 |
| | 5. | WANAR | 898.042.000 |
| | 6. | KARANGTINGGIL | 720.711.000 |
| | 7. | WARUKULON | 798.181.000 |
| | 8. | WARUWETAN | 723.265.000 |
| | 9. | KEDALI | 739.842.000 |
| | 10. | PAJI | 772.931.000 |
| | 11. | SUMBERJO | 760.462.000 |
| | 12. | CUNGKUP | 794.518.000 |
| | 13. | BUGOHARJO | 757.687.000 |
| | 14. | NGAMBEG | 789.161.000 |
| | 15. | BABATKUMPUL | 880.784.000 |
| | 16. | TANGGUNGAN | 790.972.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|----------|------------------|----------------|
| | 17. | PADENGANPLOSO | 920.668.000 |
| | JUMLAH | | 13.286.476.000 |
| 14. | PACIRAN | | |
| | 1. | KANDANGSEMANGKON | 827.493.000 |
| | 2. | PACIRAN | 968.931.000 |
| | 3. | SUMURGAYAM | 932.118.000 |
| | 4. | SENDANGAGUNG | 1.020.365.000 |
| | 5. | SENDANGDUWUR | 906.360.000 |
| | 6. | TUNGGUL | 938.457.000 |
| | 7. | KRANJI | 856.818.000 |
| | 8. | DRAJAT | 787.418.000 |
| | 9. | BANJARWATI | 915.355.000 |
| | 10. | KEMANTREN | 771.631.000 |
| | 11. | SIDOKELAR | 723.092.000 |
| | 12. | TLOGOSADANG | 712.726.000 |
| | 13. | PALOH | 748.346.000 |
| | 14. | WERU | 711.713.000 |
| | 15. | SIDOKUMPUL | 695.303.000 |
| | 16. | WARULOR | 740.376.000 |
| | JUMLAH | | 13.256.502.000 |
| 15. | SOLOKURO | | |
| | 1. | DADAPAN | 890.954.000 |
| | 2. | TEBLURU | 807.476.000 |
| | 3. | SUGIHAN | 760.536.000 |
| | 4. | TENGGULUN | 735.229.000 |
| | 5. | PAYAMAN | 925.905.000 |
| | 6. | SOLOKURO | 768.930.000 |
| | 7. | TAKERHARJO | 792.741.000 |
| | 8. | DAGAN | 967.176.000 |
| | 9. | BANYUBANG | 727.449.000 |
| | 10. | BLURI | 714.345.000 |
| | JUMLAH | | 8.090.741.000 |
| 16. | MANTUP | | |
| | 1. | SUKOBENDU | 879.036.000 |
| | 2. | TUNGGUNJAGIR | 827.524.000 |
| | 3. | SUMBERBENDO | 772.489.000 |
| | 4. | MANTUP | 841.988.000 |
| | 5. | KEDUKBEMBEM | 782.445.000 |
| | 6. | SUMBERDADI | 750.055.000 |
| | 7. | KEDUNGSOKO | 784.607.000 |
| | 8. | TUGU | 735.934.000 |
| | 9. | SUKOSARI | 807.931.000 |
| | 10. | SUMBERAGUNG | 733.117.000 |
| | 11. | SIDOMULYO | 744.826.000 |
| | 12. | MOJOSARI | 778.712.000 |
| | 13. | PLABUHANREJO | 795.707.000 |
| | 14. | SUMBERKEREK | 930.715.000 |
| | 15. | RUMPUK | 789.617.000 |
| | JUMLAH | | 11.954.703.000 |
| 17. | SUKODADI | | |
| | 1. | SIWALANREJO | 721.595.000 |
| | 2. | KEBONSARI | 723.693.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|--------------|---------------|----------------|
| | 3. | SUKOLILO | 802.375.000 |
| | 4. | PAJANGAN | 748.734.000 |
| | 5. | KADUNGREMBUG | 817.855.000 |
| | 6. | SUMBERAGUNG | 745.622.000 |
| | 7. | SUKODADI | 881.562.000 |
| | 8. | SUMBERAJI | 738.894.000 |
| | 9. | MENONGO | 751.894.000 |
| | 10. | MADULEGI | 856.424.000 |
| | 11. | BANJAREJO | 790.225.000 |
| | 12. | PLUMPANG | 780.722.000 |
| | 13. | BANDUNGSARI | 833.880.000 |
| | 14. | SIDOGEMBUL | 940.439.000 |
| | 15. | BALONGTAWUN | 813.057.000 |
| | 16. | GEDANGAN | 889.812.000 |
| | 17. | TLOGOREJO | 723.304.000 |
| | 18. | BATURONO | 775.070.000 |
| | 19. | SURABAYAN | 716.065.000 |
| | 20. | SUGIHREJO | 767.459.000 |
| | JUMLAH | | 15.818.681.000 |
| 18. | KARANGGENENG | | |
| | 1. | BANTENGPutih | 729.936.000 |
| | 2. | KARANGREJO | 729.550.000 |
| | 3. | LATUKAN | 775.074.000 |
| | 4. | GUCI | 757.432.000 |
| | 5. | KALIGERMAN | 722.221.000 |
| | 6. | SUNGELEBAK | 900.128.000 |
| | 7. | PRIJEKNGABLAK | 721.335.000 |
| | 8. | TRACAL | 749.366.000 |
| | 9. | SONOADI | 705.860.000 |
| | 10. | KALANGANYAR | 769.208.000 |
| | 11. | BANJARMADU | 822.248.000 |
| | 12. | KENDALKEMLAGI | 789.966.000 |
| | 13. | KAWISTOLEGI | 766.048.000 |
| | 14. | JAGRAN | 735.310.000 |
| | 15. | KARANGWUNGU | 729.850.000 |
| | 16. | SUMBERWUDI | 853.792.000 |
| | 17. | KARANGGENENG | 845.933.000 |
| | 18. | MERTANI | 733.823.000 |
| | JUMLAH | | 13.837.080.000 |
| 19. | KEMBANGBAHU | | |
| | 1. | TLOGOAGUNG | 768.639.000 |
| | 2. | KEDUNGMEGARIH | 864.185.000 |
| | 3. | SIDOMUKTI | 777.141.000 |
| | 4. | SUKOSONGO | 744.440.000 |
| | 5. | KALIWATES | 770.844.000 |
| | 6. | KEDUNGASRI | 888.505.000 |
| | 7. | DOYOMULYO | 750.421.000 |
| | 8. | KEMBANGBAHU | 732.016.000 |
| | 9. | MAOR | 773.822.000 |
| | 10. | MORONYAMPLUNG | 770.766.000 |
| | 11. | MANGKUJAJAR | 801.963.000 |
| | 12. | PUTER | 875.312.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|------------|------------------|----------------|
| | 13. | PELANG | 832.542.000 |
| | 14. | DUMPIAGUNG | 821.093.000 |
| | 15. | RANDUBENER | 758.298.000 |
| | 16. | LOPANG | 1.316.473.000 |
| | 17. | GINTUNGAN | 789.701.000 |
| | 18. | KATEMAS | 746.711.000 |
| | JUMLAH | | 14.782.872.000 |
| 20. | KALITENGAH | | |
| | 1. | PUCANGRO | 725.106.000 |
| | 2. | PUCANGTELU | 734.969.000 |
| | 3. | SOMOSARI | 721.560.000 |
| | 4. | JELAKCATUR | 867.019.000 |
| | 5. | MUNGLI | 716.752.000 |
| | 6. | PENGANGSALAN | 717.878.000 |
| | 7. | DIBEE | 701.158.000 |
| | 8. | BUTUNGAN | 839.129.000 |
| | 9. | LUKREJO | 774.538.000 |
| | 10. | TIWET | 710.247.000 |
| | 11. | BLAJO | 754.063.000 |
| | 12. | KALITENGAH | 742.835.000 |
| | 13. | GAMBUHAN | 965.369.000 |
| | 14. | CLURING | 718.208.000 |
| | 15. | BOJOASRI | 934.394.000 |
| | 16. | KEDIREN | 737.068.000 |
| | 17. | KULURAN | 769.838.000 |
| | 18. | CANDITUNGGAL | 728.015.000 |
| | 19. | SUGIHWARAS | 744.389.000 |
| | 20. | TUNJUNGMEKAR | 696.110.000 |
| | JUMLAH | | 15.298.645.000 |
| 21. | TURI | | |
| | 1. | GEGER | 911.257.000 |
| | 2. | BADURAME | 803.461.000 |
| | 3. | KARANGWEDORO | 766.477.000 |
| | 4. | WANGUNREJO | 731.796.000 |
| | 5. | PUTATKUMPUL | 844.075.000 |
| | 6. | KEBEN | 805.983.000 |
| | 7. | SUKOANYAR | 862.450.000 |
| | 8. | KEMLAGIGEDE | 775.818.000 |
| | 9. | TURI | 731.570.000 |
| | 10. | KEMLAGILOR | 785.653.000 |
| | 11. | SUKOREJO | 868.107.000 |
| | 12. | TAWANGREJO | 766.437.000 |
| | 13. | BAMBANG | 723.086.000 |
| | 14. | POMAHANJANGGAN | 794.301.000 |
| | 15. | TAMBAKPLOSO | 741.884.000 |
| | 16. | BALUN | 821.125.000 |
| | 17. | NGUJUNGREJO | 782.631.000 |
| | 18. | KEPUDIBENER | 925.746.000 |
| | 19. | GEDONGBOYOUNTUNG | 776.756.000 |
| | JUMLAH | | 15.218.613.000 |
| 22. | LAMONGAN | | |
| | 1. | RANCANGKENCONO | 765.974.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|-----|--------------------|----------------|
| | 2. KARANGLANGIT | 868.872.000 |
| | 3. PANGKATREJO | 801.845.000 |
| | 4. KEBET | 716.683.000 |
| | 5. SENDANGREJO | 763.473.000 |
| | 6. SUMBERJO | 765.646.000 |
| | 7. TANJUNG | 704.524.000 |
| | 8. PLOSOWAHYU | 863.750.000 |
| | 9. WAJIK | 732.757.000 |
| | 10. KRAMAT | 743.146.000 |
| | 11. MADE | 887.807.000 |
| | 12. SIDOMUKTI | 698.348.000 |
| | JUMLAH | 9.312.825.000 |
| 23. | TIKUNG | |
| | 1. WONOKROMO | 773.906.000 |
| | 2. SOKO | 857.794.000 |
| | 3. GUMININGREJO | 867.460.000 |
| | 4. BAKALANPULE | 804.303.000 |
| | 5. TAKERANKLATING | 792.184.000 |
| | 6. KELORARUM | 753.029.000 |
| | 7. JOTOSANUR | 946.780.000 |
| | 8. PENGUMBULANADI | 761.980.000 |
| | 9. JATIREJO | 919.921.000 |
| | 10. DUKUHAGUNG | 752.888.000 |
| | 11. TAMBAKRIGADUNG | 771.786.000 |
| | 12. BOTOPUTIH | 774.824.000 |
| | 13. BALONGWANGI | 838.092.000 |
| | JUMLAH | 10.614.947.000 |
| 24. | KARANGBINANGUN | |
| | 1. WARUK | 709.570.000 |
| | 2. SUKOREJO | 751.976.000 |
| | 3. KARANGANOM | 738.354.000 |
| | 4. SOMOWINANGUN | 867.710.000 |
| | 5. KETAPANGTELU | 1.051.649.000 |
| | 6. MAYONG | 844.278.000 |
| | 7. PALANGAN | 757.426.000 |
| | 8. BLAWI | 723.531.000 |
| | 9. BANJAREJO | 821.363.000 |
| | 10. PUTATBANGAH | 1.017.910.000 |
| | 11. BANYUURIP | 723.228.000 |
| | 12. PENDOWOLIMO | 738.601.000 |
| | 13. BARANGGAYAM | 916.383.000 |
| | 14. WATANGPANJANG | 770.060.000 |
| | 15. SAMBOPINGGIR | 721.817.000 |
| | 16. PRIYOSO | 718.853.000 |
| | 17. WINDU | 716.616.000 |
| | 18. BOGOBABADAN | 729.428.000 |
| | 19. GAWEREJO | 774.319.000 |
| | 20. KURO | 1.183.680.000 |
| | 21. KARANGBINANGUN | 726.496.000 |
| | JUMLAH | 17.003.248.000 |
| 25. | DEKET | |
| | 1. SIDOREJO | 726.476.000 |
| | 2. DLANGGU | 774.890.000 |

| 1 | 2 | | 3 |
|-----|----------|----------------|----------------|
| | 3. | LALADAN | 741.891.000 |
| | 4. | DEKETKULON | 731.279.000 |
| | 5. | DEKETWETAN | 799.238.000 |
| | 6. | SUGIHWARAS | 930.771.000 |
| | 7. | DINOYO | 737.274.000 |
| | 8. | SIDOMULYO | 802.268.000 |
| | 9. | REJOSARI | 735.426.000 |
| | 10. | PANDANPANCUR | 738.926.000 |
| | 11. | SIDOBINANGUN | 764.130.000 |
| | 12. | BABATAGUNG | 730.425.000 |
| | 13. | TUKKERTO | 758.043.000 |
| | 14. | WEDUNI | 730.848.000 |
| | 15. | REJOTENGAH | 732.164.000 |
| | 16. | SRIRANDE | 873.869.000 |
| | 17. | PLOSOBUDEN | 738.487.000 |
| | JUMLAH | | 13.046.405.000 |
| 26. | GLAGAH | | |
| | 1. | SOKO | 716.115.000 |
| | 2. | MOROCALAN | 732.640.000 |
| | 3. | GEMPOLPENDOWO | 701.957.000 |
| | 4. | PASI | 750.121.000 |
| | 5. | RAYUNGGUMUK | 746.735.000 |
| | 6. | MENGANTI | 748.745.000 |
| | 7. | MARGOANYAR | 709.930.000 |
| | 8. | BEGAN | 707.965.000 |
| | 9. | MENDOGO | 720.474.000 |
| | 10. | KENTONG | 1.101.845.000 |
| | 11. | SUDANGAN | 717.112.000 |
| | 12. | MEDANG | 1.056.286.000 |
| | 13. | DUDUKLOR | 721.448.000 |
| | 14. | GLAGAH | 705.456.000 |
| | 15. | WANGEN | 1.019.437.000 |
| | 16. | TANGGUNGPRIGEL | 929.187.000 |
| | 17. | KARANGAGUNG | 713.950.000 |
| | 18. | BANGKOK | 843.152.000 |
| | 19. | JATIRENGGO | 826.566.000 |
| | 20. | BAPUHBARU | 782.740.000 |
| | 21. | BAPUHBANDUNG | 919.712.000 |
| | 22. | MELUNTUR | 800.477.000 |
| | 23. | KONANG | 718.379.000 |
| | 24. | DUKUHTUNGGAL | 729.122.000 |
| | 25. | PANGGANG | 771.661.000 |
| | 26. | WONOREJO | 747.507.000 |
| | 27. | WEDORO | 709.221.000 |
| | 28. | KARANGTURI | 722.963.000 |
| | 29. | MELUWUR | 721.403.000 |
| | JUMLAH | | 22.792.306.000 |
| 27. | SARIREJO | | |
| | 1. | KEDUNGKUMPUL | 773.993.000 |
| | 2. | DERMOLEMAHBANG | 819.033.000 |
| | 3. | SIMBATAN | 877.663.000 |
| | 4. | SUMBERJO | 783.704.000 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--------------------|-----------------|
| | 5. CANGGAH | 731.994.000 |
| | 6. BERU | 745.654.000 |
| | 7. TAMBAKMENJANGAN | 799.518.000 |
| | 8. GEMPOLTUKMLOKO | 755.773.000 |
| | 9. SARIREJO | 758.165.000 |
| | JUMLAH | 7.045.497.000 |
| | JUMLAH TOTAL | 371.757.666.000 |

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

